

IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF UNTUK KESETARAAN PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

Rafi Sam Putra Nasrullah

Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
rafisamputra12@gmail.com

Adi Soesiantoro

Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
adisusiantoro@untag-sby.ac.id

Anggraeny Puspaningtyas

Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
anggraenypuspa@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Dalam upaya untuk memberikan semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, akses yang sama terhadap pendidikan, penelitian ini melihat bagaimana Program Pendidikan Inklusif dilaksanakan di kota Surabaya. Dengan menawarkan layanan pendidikan yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan unik setiap siswa, Pendidikan Inklusif memberikan kesempatan bagi semua anak untuk belajar bersama dalam pengaturan yang sama tanpa menghadapi diskriminasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa baik inisiatif pendidikan inklusif diterapkan di kota Surabaya, mengidentifikasi elemen-elemen yang memfasilitasi dan menghambat proses ini, serta menawarkan saran untuk meningkatkan program tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang mencakup analisis dokumen kebijakan, wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang relevan, dan observasi langsung. Melalui sejumlah inisiatif strategis, kota Surabaya telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menwrapkan pendidikan inklusif, menurut temuan penelitian. Anak-anak dengan kebutuhan khusus kini memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan berkat program ini, yang juga telah mempromosikan lingkungan belajar yang inklusif. Aspek pendukung kunci meliputi dukungan kebijakan pemerintah Kota Surabaya, pelatihan guru yang berkelanjutan, ketersediaan fasilitas yang dapat diakses, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk organisasi masyarakat sipil. Namun, masih ada sejumlah hambatan penting yang harus diatasi sebelum program dapat diterapkan. Tantangan utama yang harus ditangani adalah kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, ketidaktahuan masyarakat umum tentang pendidikan inklusif, dan variasi dalam kualitas layanan antara lembaga. Selain itu, efektivitas keseluruhan

program dipengaruhi oleh sistem evaluasi dan pemantauan, yang saat ini masih kurang baik. Studi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendidikan inklusif di Kota Surabaya telah mencapai kemajuan yang sangat baik, meskipun masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. Rekomendasi mencakup peningkatan kapasitas pendidik melalui program pelatihan yang lebih intensif, meningkatkan kesadaran publik melalui kampanye pendidikan, mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi yang lebih komprehensif, dan mengalokasikan pendanaan yang lebih memadai untuk memastikan keberlanjutan program.

Kata Kunci: *Pendidikan Inklusif, Kesetaraan Pendidikan, Anak Berkebutuhan Khusus, Implementasi Program, Kota Surabaya*

ABSTRACT

In an effort to provide all students, including those with special needs, equal access to education, this research examines how the Inclusive Education Program is implemented in the city of Surabaya. By offering educational services tailored to meet the unique needs of each student, Inclusive Education provides opportunities for all children to learn together in the same setting without facing discrimination. The aim of this research is to evaluate how well the inclusive education initiative is applied in the city of Surabaya, to identify the elements that facilitate and hinder this process, and to offer suggestions for improving the program. This study uses a qualitative methodology with a case study approach that includes policy document analysis, in-depth interviews with relevant stakeholders, and direct observation. Through a number of strategic initiatives, the city of Surabaya has demonstrated a strong commitment to implementing inclusive education, according to research findings. Children with special needs now have better access to education thanks to this program, which has also promoted an inclusive learning environment. Key supporting aspects include support from the government policies of Surabaya City, ongoing teacher training, the availability of accessible facilities, and collaboration with various stakeholders including civil society organizations. However, there are still several significant barriers that must be addressed before the program can be fully implemented. The main challenges that need to be tackled are the lack of trained human resources, the general public's ignorance about inclusive education, and variations in the quality of services among institutions. Additionally, the overall effectiveness of the program is influenced by the evaluation and monitoring system, which is currently still inadequate. This study shows that the implementation of inclusive education programs in Surabaya City has made very good progress, although it still requires further improvements. Recommendations include enhancing educators' capacity through more intensive training programs, increasing public awareness through educational campaigns, developing a more comprehensive monitoring and evaluation system, and allocating more adequate funding to ensure the sustainability of the program.

Keywords: *Inclusive Education, Educational Equality, Children With Special Needs, Program Implementation, Surabaya City*

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia terdapat berbagai macam suku, ras, dan peradaban. Keberagaman tersebut berdampak pada berbagai bidang, salah satunya adalah pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik secara aktif agar memiliki kekuatan spiritual dan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan Pendidikan Nasional yang berlandaskan pada prinsip-prinsip agama dan budaya Nasional Indonesia, sekaligus disesuaikan dengan kebutuhan dunia modern. Oleh karena itu, semua unsur pendidikan yang saling terkait atau terkait untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional dianggap sebagai bagian dari sistem Pendidikan Nasional (Megawati, 2003).

Regulasi nomor 72 tahun 2019 dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pendidikan di Indonesia sehingga anak-anak kecil dapat belajar lebih cepat dan tidak tertinggal dari anak-anak yang dilahirkan dengan keterampilan atau kecemerlangan. Dari sekolah dasar hingga SMP, SMA atau sekolah kejuruan, dan pendidikan tinggi, usia pendidikan anak usia dini adalah enam tahun. Persyaratan pendidikan anak usia dini dapat dengan cepat menyerap pengetahuan baru yang diperoleh di sekolah dasar. Tujuan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2019 memiliki dampak yang signifikan pada pendidikan Indonesia saat ini. Hal ini diketahui dari sejumlah aspek yang memotivasi terkait infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, layanan pendidikan, dan dukungan administratif. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, setiap orang harus memiliki akses ke pendidikan berkualitas tinggi melalui Sistem Pendidikan Nasional (Negara, 2019).

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024, tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, telah memperkuat kerangka hukum untuk Kurikulum Merdeka dan Pendidikan Inklusif di Indonesia. Aturan ini menetapkan pedoman kebijakan dan memberikan kerangka hukum untuk penerapan nasional Kurikulum Merdeka. Pedoman pelaksanaan yang diterbitkan untuk pendidikan inklusif menawarkan instruksi yang tepat untuk penerapannya. Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, yang menegaskan peran negara dalam pendidikan, menjamin setiap warga negara memiliki hak atas pendidikan, dan menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengembangkan sistem pendidikan yang inklusif dan fleksibel, menjadi dasar bagi kedua program tersebut. Pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah diatur dalam Kurikulum Merdeka, yang saat ini merupakan Kurikulum Nasional Indonesia. Tujuan dari kurikulum ini adalah untuk memberikan kejelasan mengenai arah kurikulum dan kebijakan pembelajaran. Sekitar 81% institusi Pendidikan telah mengimplementasikannya, dan ini akan berlaku hingga tahun ajaran 2026–2027 (Inklusif, 2024).

Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengingatkan semua orang bahwa untuk mencapai Pendidikan Inklusif, seluruh ekosistem Pendidikan perlu terus bekerjasama dan berpartisipasi. Seperti yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Memadai bagi Siswa dengan Disabilitas di

Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi, ini termasuk memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD), baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Terdapat tiga tingkat pendidikan dan pelatihan guru: dasar, lanjutan, dan mahir. Modul tingkat dasar mencakup sejumlah subjek, seperti keragaman siswa, pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan kerja sama untuk menciptakan lingkungan yang ramah, aman, dan nyaman (Kemendikbud, 2024).

Menurut Pasal 1 Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2022, yang mengatur pedoman pelaksanaan Pendidikan Inklusif di tingkat sekolah dasar dan menengah pertama di Kota Surabaya, serta tujuan yang diuraikan dalam Pasal 2, tujuan pelaksanaan Pendidikan Inklusif adalah untuk membangun sistem layanan pendidikan yang dapat memperhatikan kondisi, kebutuhan, dan karakteristik siswa. Tujuan Pendidikan Inklusif kemudian dinyatakan dalam Pasal 3 sebagai berikut: 1) memberikan siswa dengan disabilitas sebanyak mungkin kesempatan untuk menerima pengajaran berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan dan keterampilan mereka. 2) mencapai sistem pendidikan yang bebas dari diskriminasi terhadap semua siswa dan yang menghargai keberagaman (Rosari, 2023).

Pendidikan Inklusif di Kota Surabaya bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dalam akses pendidikan bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Surabaya telah menempuh berbagai langkah strategis untuk menerapkan Program Pendidikan Inklusif, sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa setiap anak, terlepas dari kondisi fisik, mental, atau sosialnya, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di lingkungan sekolah umum. Pemerintah Kota Surabaya, melalui Dinas Pendidikan, telah mengeluarkan Kebijakan untuk mendorong sekolah-sekolah di berbagai jenjang (SD, SMP, SMA) agar menerapkan Pendidikan Inklusif. Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Surabaya juga telah membentuk pusat layanan Pendidikan Inklusif yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada sekolah-sekolah yang menerapkan program ini. Salah satu fokus utama adalah meningkatkan akses pendidikan bagi ABK serta memastikan bahwa mereka menerima perlakuan yang sama dengan siswa lainnya.

Teori Smith tentang implementasi kebijakan publik sangat relevan dalam menganalisis Program Pendidikan Inklusif di Kota Surabaya. Smith berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Implementasi Kebijakan, yang dapat dihubungkan dengan pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif untuk kesetaraan pendidikan. Menurut Smith, ada empat dimensi utama yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Kebijakan, yaitu Kebijakan yang Ideal, Kelompok Sasaran, Organisasi Pelaksana, dan Faktor-Faktor Lingkungan.

B. KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Keputusan dan tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah publik dan mencapai tujuan masyarakat tertentu secara kolektif disebut kebijakan publik. Ini mencakup setiap langkah proses, termasuk mengidentifikasi masalah,

mengembangkan solusi potensial, membuat keputusan, melaksanakannya, dan mengevaluasinya. Menurut Dye kebijakan publik yaitu “apa yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan.” Dalam konteks ini kebijakan Pendidikan Inklusif di Surabaya merupakan pilihan aktif pemerintah kota untuk:

1. Menyediakan akses Pendidikan seluruh sekolah Surabaya kepada semua anak tanpa diskriminasi.
2. Melibatkan sekolah umum untuk bisa terbuka menerima ABK.
3. Memberikan pelatihan khusus kepada guru reguler tentang pendekatan inklusif.

Implementasi Kebijakan Publik

Salah satu fase terpenting dalam pelaksanaan kebijakan publik adalah mengubah kebijakan yang dinyatakan menjadi tindakan praktis di lapangan. 'Jembatan' antara tujuan kebijakan dan hasil yang diharapkan sering kali dianggap sebagai tahap ini. Proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang biasanya dinyatakan dalam undang-undang, regulasi pemerintah, keputusan pengadilan, atau perintah presiden disebut sebagai implementasi kebijakan. Prosedur ini melibatkan upaya untuk mengubah pilihan menjadi langkah-langkah operasional dan mencapai perubahan besar atau kecil yang dimaksudkan oleh keputusan kebijakan. Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (Nurmayana, 2016), Mereka menekankan enam (6) variabel implementasi kebijakan adalah:

1. Standar dan tujuan kebijakan → Surabaya menetapkan tujuan jelas dalam Perwali No. 52/2022.
2. Sumber daya → Masih terbatas pada sekolah tertentu, butuh pemerataan.
3. Komunikasi antar organisasi → Diperlukan sinergi antara Dinas Pendidikan, sekolah, dan orang tua.
4. Disposisi pelaksana → Guru dan kepala sekolah perlu pelatihan & peningkatan komitmen.
5. Lingkungan eksternal → Faktor sosial, budaya, dan ekonomi masih menjadi hambatan.
6. Kepatuhan → Belum semua sekolah benar-benar menjalankan prinsip inklusif.

Model Implementasi Kebijakan Smith

a. Kebijakan Ideal

Teori Smith menekankan pentingnya kejelasan ide kebijakan dalam implementasi. Dalam konteks pendidikan inklusif di Surabaya, ide kebijakan yang mendasarinya adalah kesetaraan pendidikan bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Kebijakan pendidikan inklusif yang dijalankan di Indonesia, termasuk di Surabaya, telah didukung oleh kerangka hukum yang jelas, seperti Permendikbud No. 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan yang setara, tanpa diskriminasi.

b. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran merupakan sekelompok orang dalam masyarakat yang menerima suatu kebijakan. Oleh karena itu, sikap kelompok sasaran dalam pelaksanaan kebijakan berpengaruh besar pada tercapai atau tidaknya tujuan dari kebijakan karena mereka bisa saja menolak maupun menerima kebijakan

yang diterapkan. Kelompok sasaran, yaitu orang-orang dalam organisasi atau kelompok yang paling terpengaruh oleh kebijakan yang diharapkan dapat menyesuaikan pola perilakunya sesuai dengan tuntutan kebijakan. Beberapa hal yang relevan, yakni tingkat organisasi atau lembaga kelompok sasaran dan pengalaman sebelumnya dari kelompok sasaran.

c. Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana adalah lembaga, institusi, atau entitas yang secara langsung bertanggung jawab untuk melaksanakan inisiatif pendidikan inklusif, yang mencakup kebijakan, manajemen, pengajaran, dan evaluasi. Struktur umum organisasi pelaksana di Indonesia ditunjukkan di bawah ini (yang dapat diubah untuk mencerminkan kebijakan lokal, seperti di Surabaya).

d. Faktor-Faktor Lingkungan

Kebijakan yang diimplementasikan tentunya memiliki kendala atau tantangan pada terlaksananya dilapangan. Tantangan tersebut juga dapat berasal dari lingkungan masyarakat dimana kebijakan itu diterapkan sehingga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Dalam implementasi kebijakan unsur lingkungan turut mempengaruhi karena dukungan dari unsur lingkungan diperlukan dalam upaya mencapai tujuan dari implementasi kebijakan. Adapun unsur lingkungan tersebut terdiri dari aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik.

Program Pendidikan Inklusif Kota Surabaya

Program Pendidikan Inklusif adalah strategi pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar yang setara kepada semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas. Pendidikan inklusif menekankan penerimaan keragaman siswa dan menghilangkan semua jenis diskriminasi dalam proses mengajar dan belajar. Pendidikan inklusif adalah pendekatan pendidikan yang menempatkan semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), dalam satu sistem pendidikan yang sama, dengan menyediakan dukungan sesuai kebutuhan mereka. Kota Surabaya, sebagai kota metropolitan dan pusat pendidikan di Jawa Timur, telah menunjukkan komitmen dalam mewujudkan pendidikan yang merata dan berkeadilan melalui program pendidikan inklusif. Dasar hukum yang kuat akan mempengaruhi implementasi kebijakan untuk bisa menerapkan Program Pendidikan Inklusif Kota Surabaya. Kota Surabaya memiliki payung hukum yang kokoh untuk Pendidikan Inklusif terdapat pada Perwali Surabaya nomor 52 tahun 2022 dan Pergub Jawa Timur nomor 30 tahun 2018. Tujuannya adalah untuk memberikan kesamaan bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk mendapatkan akses dan layanan Pendidikan yang bermutu.

Dinas Pendidikan Kota Surabaya melakukan berbagai upaya dalam Program Pendidikan Inklusif, termasuk memberikan bimbingan teknis kepada guru, melakukan observasi dan asesmen siswa setiap akhir semester, serta melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung layanan Pendidikan Inklusif. Sosialisasi dan Kolaborasi terus dilakukan supaya program Pendidikan Inklusif dapat nilai positif dari masyarakat dan bisa berkolaborasi dengan baik. Pendidikan Inklusif memiliki bobot 15% dalam penerimaan siswa-siswi jalur zonasi. Dikarenakan masih terbatasnya fasilitas yang memadai, dan faktor lingkungan di

sekolah, Dispendik juga mengupayakan untuk pemetaan jenis khusus terhadap anak inklusi supaya bisa terfasilitasi dengan baik.

C. METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Mengenai apa yang dimaksud Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang mempunyai tujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek secara lengkap dan disertai uraian berupa kata-kata. Dengan bahasa, dalam konteks alami tertentu dan dengan itu menggunakan metode ilmiah yang berbeda. Penelitian ini secara khusus ditujukan pada desain Penelitian Kualitatif. Tujuan penelitian Kualitatif adalah mengatakan bahwa penyelesaian permasalahan saat ini didasarkan pada data. Penelitian Kualitatif dengan desain deskriptif merupakan penelitian yang memberikan gambaran rinci tentang individu atau kelompok kondisi dan gejala yang ada. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan memahami Implementasi Program Pendidikan Inklusif untuk Kesetaraan Pendidikan di Kota Surabaya.

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam bagaimana Implementasi Program Pendidikan Inklusif untuk Kesetaraan Pendidikan Kota Surabaya dengan menggunakan variabel dari teori Smith yakni:

- a) Implementasi Program Pendidikan Inklusif untuk Kesetaraan Pendidikan di Kota Surabaya.
 - i) Kebijakan yang di idealkan.
 - ii) Sasaran Kelompok.
 - iii) Organisasi Pelaksana.
 - iv) Faktor-faktor Lingkungan.
- b) Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Pendidikan Inklusif untuk Kesetaraan Pendidikan di Kota Surabaya.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang terletak di jl. Jagir Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Dan di SMPN 28 Surabaya yang terletak di jl. Raya Lidah Wetan, kecamatan Lakarsantri, Surabaya. Saya memilih lokasi penelitian di 2 lokasi dikarenakan program Pendidikan inklusif ini adalah program yang di jalankan pemerintah dan dilaksanakan oleh sekolah sekolah yang menerapkannya. SMPN 28 Surabaya ini lah yang saya pilih dari beberapa sekolah yang menerapkan, karena di sekolah ini adalah pionir untuk program pendidikan inklusif se Surabaya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan inklusif adalah pendekatan pendidikan yang menempatkan semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), dalam satu sistem pendidikan yang sama, dengan menyediakan dukungan sesuai kebutuhan mereka. Kota Surabaya, sebagai kota metropolitan dan pusat pendidikan di Jawa Timur, telah menunjukkan komitmen dalam mewujudkan pendidikan yang merata dan berkeadilan melalui program pendidikan inklusif. Dasar hukum yang kuat akan mempengaruhi implementasi kebijakan untuk bisa menerapkan Program Pendidikan Inklusif Kota Surabaya. Kota Surabaya memiliki payung hukum yang kokoh untuk Pendidikan Inklusif terdapat pada Perwali Surabaya nomor 52 tahun

2022 dan Pergub Jawa Timur nomor 30 tahun 2018. Tujuannya adalah untuk memberikan kesamaan bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk mendapatkan akses dan layanan Pendidikan yang bermutu.

Dinas Pendidikan Kota Surabaya melakukan berbagai upaya dalam Program Pendidikan Inklusif, termasuk memberikan bimbingan teknis kepada guru, melakukan observasi dan asesmen siswa setiap akhir semester, serta melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung layanan Pendidikan Inklusif. Sosialisasi dan Kolaborasi terus dilakukan supaya program Pendidikan Inklusif dapat nilai positif dari masyarakat dan bisa berkolaborasi dengan baik. Pendidikan Inklusif memiliki bobot 15% dalam penerimaan siswa-siswi jalur zonasi. Dikarenakan masih terbatasnya fasilitas yang memadai, dan faktor lingkungan di sekolah, Dispendik juga mengupayakan untuk pemetaan jenis khusus terhadap anak inklusi supaya bisa terfasilitasi dengan baik.

SMPN 28 Surabaya mengimplementasikan Program Pendidikan Inklusif dengan baik. Dengan adanya Program Pendidikan Inklusif anak berkebutuhan khusus bisa bersekolah dengan anak normal seperti biasa. Kesetaraan adalah keutamaan dari Program Pendidikan Inklusif untuk menjaga dari diskriminasi, siswa-siswi akan terbiasa dengan dibentuknya Program Pendidikan Inklusif karena mereka bisa berinteraksi seperti orang normal tanpa membedakan dari faktor fisik. Di setiap sekolah memiliki sarana dan prasarana yang mendukung dalam Pendidikan Inklusif, terutama di bagian fasilitas dan sumber daya manusianya. Pembahasan ini mengungkapkan 4 indikator yaitu:

1. Kebijakan yang diidealkan

Pemerintah kota Surabaya akan berunding dengan beberapa penggerak karena harus segera di tindak lanjuti agar program tidak di anggap sebagai program yang gagal. Seiring berjalannya waktu Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengeluarkan kebijakan kuat dalam program pendidikan inklusif, yang diimplementasikan melalui Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2022. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan berkualitas di sekolah reguler.

Dari pembuatan kebijakan ini maka sekolah sekolah lain yang akan menerapkan program Pendidikan inklusif akan bisa berjalan dengan maksimal. Jika pemkot merekomendasikan ke beberapa sekolah akan berdampak baik untuk kedepannya. Kebijakan yang diidealkan ini harus berlangsung terus menerus dan di perbarui ketika ada kesalahan dan di perkuat jika kebijakan ini melemah. Dengan adanya kebijakan yang diidealkan, sekolah sekolah di kota Surabaya akan menjadi sekolah ramah anak. Dikarenakan kebijakan ini sudah beberapa kali percobaan dan sudah mulai terlihat berjalan dengan baik akhirnya pemkot memutuskan semua sekolah yang ada di kota Surabaya akan menjalankan sekolah ramah anak terlebih dahulu supaya program Pendidikan inklusif bisa di terapkan ke sekolah.

2. Sasaran Kelompok

Sasaran utama program pendidikan inklusif adalah seluruh siswa, terlepas dari latar belakang, kemampuan, atau kondisi khusus mereka, termasuk siswa berkebutuhan khusus (ABK), siswa berbakat, dan siswa yang menghadapi kesulitan belajar. Tujuan utama program ini adalah memastikan semua siswa memiliki

kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung dan ramah. Tidak hanya itu, guru, masyarakat dan orang tua siswa juga berperan penting dalam sasaran ini. Dikarenakan mereka adalah tujuan untuk terbentuknya suasana yang nyaman bagi siswa inklusi. Salah satu tujuan utama dari pendidikan inklusif adalah untuk kesetaraan terhadap siswa dengan kebutuhan khusus atau latar belakang yang berbeda. Pendidikan inklusif bertujuan untuk memastikan bahwa semua siswa diperlakukan dengan adil dan memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang.

Pendidikan inklusif akan menjadi daya tarik pendaftar yang ingin menyekolahkan anaknya di sekolah regular untuk merasakan bagaimana belajar bersama tanpa adanya perbedaan dari kelompok kelompok lain. Program ini sudah menjadi bagian dari dinas Pendidikan supaya dapat di awasi dengan baik agar tercipta suasana Pendidikan lebih bersemangat dan berdaya saing tinggi.

3. Organisasi Pelaksana

Dinas Pendidikan adalah sebuah organisasi pemerintahan yang berjalan di bidang Pendidikan di suatu wilayah. Kali ini dinas Pendidikan kota Surabaya yang kita akan bahas dalam program Pendidikan inklusif. Dinas Pendidikan Kota Surabaya memiliki peran sentral dan aktif dalam penyelenggaraan program pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus (ABK) belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya, tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lainnya. Dengan adanya pandangan tersebut para siswa akan nyaman dengan kondisi yang berlangsung di sekolah.

Dinas Pendidikan mulai mengatur program untuk di jalankan ke semua sekolah yang ada di kota Surabaya. Sekolah adalah organisasi yang menjalankan program dari Pendidikan inklusif, di sekolah inklusi berbeda dengan sekolah inklusif. Perbedaan ini bisa dilihat dari siswa yang bersekolah, siswa di sekolah inklusi hanya menerima anak inklusi, tetapi di sekolah inklusif ini terdapat siswa inklusi dan siswa normal yang di gabungkan agar bisa merasakan bagaimana belajar bersama dengan teman seusianya tanpa ada perbedaan. Sekolah yang menerapkan Pendidikan inklusif memiliki peran yang sangat penting dalam bidang Pendidikan, dikarenakan menerapkan Pendidikan yang mengutamakan kesetaraan dalam berpendidikan. Kesetaraan inilah yang akan membuat siswa siswi mempunyai peluang untuk bisa bersaing bersama secara adil tanpa ada perbedaan apa pun.

4. Faktor-Faktor Lingkungan

Peran dari faktor lingkungan sangat berpengaruh bagi siswa inklusi, jika adanya pandangan yang tidak baik maka anak inklusi akan mengalami beberapa masalah misalnya tidak menerima adanya anak berkebutuhan khusus bagi mereka yang berinteraksi secara normal. Hal ini terjadi karena mereka kesulitan dalam berkomunikasi karena tidak nyambung dengan apa yang dia bicarakan dan apa yang dia pikirkan. Tidak sesuai dengan yang dilakukan siswa inklusi memiliki pemikiran yang berbeda, tapi ada juga yang sepemikiran. Ada banyak kasus yang menjadi masalah pada anak inklusi, masalah utama dalam Pendidikan inklusif meliputi kurangnya pengetahuan dan keterlibatan guru dalam menangani anak berkebutuhan khusus, terbatasnya fasilitas dan sumber daya, serta stigma sosial dan

kurangnya dukungan dari masyarakat. Selain itu, kurangnya kolaborasi antara orang tua dan sekolah menjadi tantangan dalam implementasi Pendidikan inklusif.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerjasama antar berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Langkah yang diambil untuk mengatasinya adalah pelatihan guru, peningkatan fasilitas, sosialisasi, dan kolaborasi. Memberikan pelatihan pada guru tentang Pendidikan inklusi, termasuk cara mengidentifikasi kebutuhan anak dan mengembangkan strategi pembelajaran yang tepat. Peningkatan fasilitas dan sumber daya di sekolah menyediakan ruang kelas yang ramah, perangkat lunak, dan guru pendamping khusus untuk kegiatan proses belajar lebih nyaman. Melakukan sosialisasi tentang Pendidikan inklusif kepada masyarakat, termasuk orang tua, untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap anak berkebutuhan khusus. Selain itu membangun kerjasama antar sekolah, orang tua dan masyarakat untuk membantu menciptakan lingkungan yang mendukung anak berkebutuhan khusus.

E. KESIMPULAN

Implementasi Program Pendidikan Inklusif Kota Surabaya sudah menjalankan Kebijakan dari Pemerintah Kota Surabaya dalam Perwali nomor 52 Tahun 2022. Kebijakan ini yang membuat para siswa untuk lebih semangat lagi untuk belajar tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi. Pihak sekolah dan organisasi pelaksana lain juga berperan sangat penting terutama dalam mewujudkan kesetaraan dalam ruang belajar. Karena itu para siswa yang bersekolah di sekolah regular ini bisa saling bekerja sama tanpa membedakan satu dengan yang lain. Adapun faktor-faktor yang menghambat yaitu tenaga didik yang kurang kompeten, fasilitas kurang memadai, dan juga faktor lingkungan yang masih ada oknum yang menganggap remeh anak berkebutuhan khusus.

Dari kebijakan pemerintahan Kota Surabaya memiliki dasar yang kuat adanya regulasi dan perundang-undangan yang mendorong pelaksanaan Pendidikan Inklusif. Komitmen dalam Kepemimpinan sekolah sangat penting seberapa berjalannya program inklusif di sekolah-sekolah. SMPN 28 menjadi salah satu sekolah yang mendapatkan nilai tertinggi ramah anak. Hal ini terbukti bahwa Faktor pendukung juga berasal dari Kepemimpinan dari sekolah-sekolah yang menerapkan Pendidikan Inklusif. Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang inklusi menjadi faktor penghambat karena jika ada anak berkebutuhan khusus akan ada diskriminasi karena mereka kurang memahami anak inklusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Inklusif, D. A. N. P. (2024). *Transformasi pendidikan indonesia: integrasi kurikulum nasional dan pendidikan inklusif*.
- Kemendikbud. (2024). *Kemendikbudristek Luncurkan Modul Pelatihan Berjenjang Pendidikan Inklusif*. Kemdikbud.Go.Id.
<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2024/03/kemendikbudristek-luncurkan-modul-pelatihan-berjenjang-pendidikan-inklusif>
- Megawati. (2003). *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Peraturan.Go.Id.
<https://www.peraturan.go.id/id/uu-no-20-tahun-2003>

- Negara, K. (2019). *Perpres Nomor 72 Tahun 2019. 009525*, 1–16.
- Nurmayana. (2016). *Jurnal Ilmu Sosial Jurnal Ilmu Sosial. 15(1)*, 35–52.
- Rosari, U. S. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Kota Surabaya
Ursula Susanti Rosari, Nihayatus Sholichah, Dian Ferriswara. *Soetomo
Administrasi Publik, 1(2)*, 81–94.